# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

1. **GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**
2. **Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bansari sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Kecamatan Bansari adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Bansari menjalankan fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan
3. Melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bansari sebagai berikut:

1. Camat

|  |
| --- |
| Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupatidalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. |

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; |
| b. | Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; |
| c. | Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; |
| d. | Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; |
| e. | Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; |
| f. | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; |
| g. | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatam; |
| h. | Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan |
| i. | Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. |

1. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayananan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; |
| b. | Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan; |
| c. | Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan; |
| d. | Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan; |
| e. | Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan; |
| f. | Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; |
| g. | Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; |
| h. | Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan; |
| i. | Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan; |
| j. | Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan |
| k. | Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya. |

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

* Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Perencanaan dan program kerja; |
| b. | Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan; |
| c. | Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan; |
| d. | Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan. |

* Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Pembinaan ketatausahaan dan hukum; |
| b. | Kerumahtanggaan; |
| c. | Kerjasama; |
| d. | Kearsipan; |
| e. | Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang; |
| f. | Keorganisasian dan ketatalaksanaan; |
| g. | Kehumasan; |
| h. | Analisis dan formasi jabatan; |
| i. | Kepegawaian; dan |
| j. | Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. |

1. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; |
| b. | Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; |
| c. | Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; |
| d. | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan; |
| e. | Pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; |
| f. | Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; |
| g. | Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan |
| h. | Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya. |

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; |
| b. | Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan; |
| c. | Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; |
| d. | Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa; |
| e. | Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa; |
| f. | Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan; |
| g. | Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan |
| h. | Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya. |

* 1. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat; |
| b. | Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tinkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; |
| c. | Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak; |
| d. | Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin; |
| e. | Penanggulangan masalah sosial; |
| f. | Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita; |
| g. | Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan |
| h. | Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya. |

* 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksnaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

|  |  |
| --- | --- |
|  | Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; |
| b. | Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS); |
| c. | Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; |
| d. | Pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat; |
| e. | Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zar adiktif dan bahan berbahaya; |
| f. | Pengkoordinasianpenerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, |
| g. | Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananan umum; |
| h. | Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; |
| i. | Pelaksnaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat. |

1. **Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung terdiri dari:

* 1. Camat
  2. Sekretariat
  3. Seksi Tata Pemerintahan
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Gambar 3.1**

**Bagan Organisasi**

**Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung**

**CAMAT**

**SEKRETARIS**

**KECAMATAN**

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**BENDAHARA PENGELUARAN**

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

**KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**KASI TATA PEMERINTAHAN**

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**PENGOLAH DATA/ OPERATOR**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagaimana tabel 2.1:

**Tabel 3.2**

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,**

**Pangkat dan Golongan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | | JUMLAH PEGAWAI | KET. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* |
| 1 | Kondisi pegawai berdasarkan: | |  |  |
|  | Kualisasi Pendidikan | |  |  |
|  | A. | SD | 1 |  |
|  | B. | SMP | 1 |  |
|  | C. | SMA | 11 |  |
|  | D. | Sarjana Muda (D-III) | 1 |  |
|  | E. | S-1 dan D-IV | 4 |  |
|  | F. | S-2 | 1 |  |
| **Jumlah** | | | **19** |  |
| 2 | Pangkat/Golongan | |  |  |
|  | A. | Gol I | 1 |  |
|  | B. | Gol II | 6 |  |
|  | C. | Gol III | 11 |  |
|  | D. | Gol IV | 1 |  |
| **Jumlah** | | | **19** |  |
| 3 | Jabatan | |  |  |
|  | A. | Eselon II | 0 |  |
|  | B. | Eselon III | 2 |  |
|  | C. | Eselon IV | 5 |  |
|  | D. | Eselon V | 0 |  |
|  | E. | Jabatan Fungsional Khusus | 0 |  |
|  | F. | Jabatan Fungsional Umum | 12 |  |
| **Jumlah** | | | **19** |  |

|  |
| --- |
| **Tabel 3.3.**  **Sarana dan Prasarana Kecamatan Bansari** |
| **Kab. Temanggung Tahun 2020**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | JENIS SARPRAS | TYPE/  MERK | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **1** | **Tanah** |  | **1** | **Bidang** | **Baik** | | **2** | **Gedung** |  | **6** | **Gedung** | **Baik** | |  | Bangunan gedung kantor permanen |  | 1 | Gedung | Baik | |  | Bangunan gedung tempat ibadah permanen |  | 1 | Gedung | Baik | |  | Bangunan gedung tempat pertemuan permanen |  | 1 | Gedung | Baik | |  | Bangunan tempat parkir |  | 2 | Gedung | Baik | |  | Bangunan pagar keliling |  | 1 | Gedung | Baik | |  | Taman & Halaman |  | 1 | Paket | Baik | | **3** | **Alat-alat angkutan** |  | **34** | **Unit** | **Baik** | |  | Mini bus ( 9 orang penumpang kebawah) | Toyota Avanza 1.3 EM/T | 1 | Unit | Baik | |  | Sepeda Motor Perangkat Desa | Honda Win/MCB | 13 | Unit | Rusak | |  | Sepeda Motor | Honda Win | 2 | Unit | Rusak | |  | Sepeda Motor | Suzuki Thunder/EN 125 | 1 | Unit | Rusak | |  | Sepeda Motor | Yamaha Vixion/1PA | 1 | Unit | Baik | |  | Sepeda Motor | Supra X | 2 | Unit | Baik | |  | Sepeda Motor | Supra X | 1 | Unit | Rusak | |  | Sepeda Motor Kades | Honda  Verza | 8 | Unit | Baik | |  | Sepeda Motor Kades | Yamaha Matic  MIO SOUL | 5 | Unit | Baik | | **4** | **Alat-alat kantor dan rumah tangga** |  | **104** | **Buah** | **63 Baik** | |  | Lemari besi/metal | Fujita | 1 | Buah | Baik | |  | Rak besi/metal | - | 5 | Buah | Baik | |  | Filling kabinet | Daichi | 1 | Buah | Baik | |  | Filling kabinet | Elite | 2 | Buah | Baik | |  | Filling kabinet | Lufo | 1 | Buah | Baik | |  | Filling kabinet | Royal | 2 | Buah | Baik | |  | Meja panjang kayu | - | 1 | Buah | Baik | |  | Kursi rapat | K4 hitam | 34 | Buah | Baik | |  | Kursi tunggu | - | 1 | Buah | Baik | |  | Kursi kerja | - | 45 | Buah | Baik | |  | Meja kerja | - | 3 | Buah | Baik | |  | Meja ½ biro | - | 32 | Buah | Baik | |  | Meja kursi tamu | - | 5 | Buah | Baik | |  | Lemari kayu | - | 2 | Buah | Baik | |  | Kursi kerja |  | 9 | Buah | Baik | |  | Meja kursi makan | - | 1 | Set | Baik | |  | Genset | - | 1 | Unit | Baik | |  | Tempat tidur | - | 1 | Buah | Baik | |  | Tempat tidur satpol | - | 2 | Buah | Baik | |  | Penangkal petir | - | 1 | Buah | Baik | |  | Kulkas | - | 1 | Buah | Baik | |  | Mesin cuci | - | 1 | Buah | Baik | |  | Dispenser | - | 1 | Buah | Baik | |  | Kompor gas | Rinnai | 2 | Buah | Baik | |  | Tabung gas | - | 1 | Buah | Baik | |  | Antena dan boster | - | 1 | Buah | Baik | |  | Televisi | Polytron dan Philip | 2 | Buah | Baik | |  | Sound system | - | 1 | Set | Baik | |  | Tralis | - | 41 | Buah | Baik | |  | Taplak | - | 2 | Buah | Baik | |  | UPS | - | 1 | Buah | Baik | |  | Personal computer ( PC ) | - | 6 | Unit | Baik | |  | LCD proyektor | - | 1 | Unit | Baik | |  | Hub | - | 1 | Unit | Baik | |  | Modem | - | 1 | Unit | Baik | |  | Laptop | - | 4 | Unit | Baik | |  | Hard disk eksternal | - | 1 | Unit | Baik | |  | Perlengkapan komputer | - | 2 | Unit | Baik | |  | Hand talk (HT) | - | 1 | Unit | Baik | |  | Printer | - | 6 | Buah | Baik | |  | LCD komputer | - | 6 | Unit | Baik | |  | Stabilizer | - | 1 | Unit | Baik | |

1. **Isu Strategis**

Isu strategis yang di hadapi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses/pemerataan pelayanan publik dan pelayanan di bidang lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Bansari**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting,mendasar,mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

* 1. **Data Pokok Pembangunan Daerah**

1. **Tingkat Konsistensi Program Pembangunan**

Sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  di  Indonesia sebagaimana  diatur dalam UU No.  25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaanpembangunan  antar  ruang  (waktu)  maupun  antar level  pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra tetapi dianggarkan dan dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

* + - 1. Program

**Tabel 1.1**

**Program Renja Perangkat Daerah Diluar Renstra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | PROGRAM RENJA PERANGKAT DAERAH DILUAR RENSTRA | PD PENGAMPU |
| 1 | Nihil | …. |

* + - 1. Kegiatan

**Tabel 1.2**

**Kegiatan Renja Perangkat Daerah Diluar Renstra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH DILUAR RENSTRA | PD PENGAMPU |
| 1 | Tanggap darurat bencana covid 19 | Kec. Bansari |

Sedangkan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra 2019-2023 tetapi tidak masuk di Renja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut ini :

* + - 1. Program

**Tabel 1.3**

**Program Renstra Perangkat Daerah Yang Tidak Masuk Di Renja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MASUK DI RENJA | PD PENGAMPU |
| 1 | Nihil | ... |

* + - 1. Kegiatan

**Tabel 1.4**

**Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Yang Tidak Masuk Di Renja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MASUK DI RENJA | PD PENGAMPU |
| 1 | Penanggulangan kemiskinan | Kec. Bansari |
| 2 | Fasilitasi pengembangan kawasan wira usaha | Kec. Bansari |
| 3 | Fasilitasi kawasan pedesaan | Kec. Bansari |

Adanya ketidaksesuaian antara kegiatan yang terdapat pada Renstra dengan Renja sebagai akibat adanya pengurangan anggaran kegiatan yang dialokasikan pada kegiatan tanggap darurat bencana Covid 19.

Kesesuaian program dan kegiatan antara Renja dan Renstra dapat dilihat pada diagram berikut :

**Gambar 1.5**

**Diagram Kesesuaian program/kegiatan antara Renja dan Renstra**

**Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung**

RENSTRA

RENJA

28

PROGRAM

RENSTRA

3

1

RENJA

25

KEGIATAN

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah program dalam RENSTRA Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 yang sesuai dengan RENJA Tahun 2020 sebanyak 28 program.

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Beradasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

**Tabel 2.1**

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
| 1 | 1, 00 – 2, 5996 | 25 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2, 60 – 3, 064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017.

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Pelayanan di Kecamatan Bansari dengan nilai per unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan dengan Nilai 3,15
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur Nilai 3,20
3. Waktu pelayanan Nilai 3.00
4. Biaya/Tarif pelayanan Nilai 3,85
5. Produk spesifikasi jenis layanan Nilai,3,17
6. Kompetensi pelaksana Nilai 3,13
7. Perilaku pelaksana Nilai 3,13
8. Penanganan Pengaduan Nilai 2,95
9. Sarana dan Prasarana Nilai 3,76

**Tabel 2.2**

# Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bansari

# Tahun 2015-2020 TW I

| **No.** | **TAHUN** | **NILAI** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | n.a |
| 2 | 2016 | n.a |
| 3 | 2017 | n.a |
| 4 | 2018 | n.a |
| 5 | 2019 | n.a |
| 6 | 2020 | 82 |

*Sumber : Bagian Ortala Kab Temanggung.*

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 termasuk dalam kategori baik.

1. **Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desayang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

* Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
* Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam1 bulan
* Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa diKecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**

Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa

di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2020 sampai dengan Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bansari (jiwa) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa) | 116 | 166 | 133 | 133 | 133 | 137 |
| 3 | Persentase (%) | 100 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100 | 2,92 |

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan I*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bansari sampai Tri Wulan IV sebesar 2,92 %.

**Tabel 3.2**

Jumlah Perangkat Desa dan jumlah yang melanggar disiplin

Kecamatan Bansari Tahun 2020 Triwulan I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **DESA** | **JUMLAH KADESA DAN PERANGKAT DESA** | **JUMLAH YANG MELANGGAR DISIPLIN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BANSARI | 14 | 0 |
| 2 | MOJOSARI | 12 | 0 |
| 3 | REJOSARI | 9 | 0 |
| 4 | GUNUNGSARI | 10 | 1 |
| 5 | BALESARI | 12 | 0 |
| 6 | PURBOREJO | 11 | 0 |
| 7 | TLOGOWERO | 8 | 3 |
| 8 | MARANGGEN KIDUL | 8 | 0 |
| 9 | MRANGGEN TENGAH | 8 | 0 |
| 10 | CANDISARI | 15 | 0 |
| 11 | CAMPURANOM | 11 | 0 |
| 12 | GENTINGSARI | 10 | 0 |
| 13 | TANUREJO | 9 | 0 |

Atas pelanggaran disiplin dimaksud, kepada yang bersangkutan dikenai tindakan sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara.

1. **Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari**

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di Kecamatan Bansari. Persentase kepemilikan KTP- el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari

Tahun 2015 – 2020 sampai dengan Tri Wulan I.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Jumlahpenduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa) | 17.542 | 19.850 | 16.825 | 17.716 | 17.716 | 18,355 |
| 2 | Jumlahpenduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari | 17.565 | 17.638 | 17.843 | 18.109 | 18.109 | 18.411 |
| 3 | Persentase (%) | 99,87 | 112,548 | 94,40 | 97,83 | 97.83 | 99,70 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Dari data di atas diketahui jika tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Bansari terhadap kepemilikan KTP elektronik mengalami peningkatan dari tahun sebelumya. Adapun data kepemilikan KTP elektronik dirinci per desa adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa** | **Jumlah Wajib KTP** | **Jumlah Kepemilikan KTP** | **Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el** | **Ket.** |
| 1. | BANSARI | 3.580 | 3.573 | 7 |  |
| 2. | MRANGGEN TENGAH | 659 | 658 | 1 |  |
| 3. | MRANGGEN KIDUL | 1.023 | 1.023 | 0 |  |
| 4. | BALESARI | 1.819 | 1.812 | 7 |  |
| 5. | TLOGOWERO | 768 | 766 | 2 |  |
| 6. | CAMPURANOM | 1.268 | 1.262 | 6 |  |
| 7. | TANUREJO | 662 | 661 | 1 |  |
| 8. | CANDISARI | 2.681 | 2.666 | 15 |  |
| 9. | MOJOSARI | 1.768 | 1.764 | 4 |  |
| 10. | GENTINGSARI | 994 | 990 | 4 |  |
| 11. | GUNUNGSARI | 1.117 | 1.113 | 4 |  |
| 12 | PURBOREJO | 1.404 | 1.400 | 4 |  |
| 13. | REJOSARI | 708 | 707 | 1 |  |

*Sumber : Dsumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

1. **Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

**Tabel 5.1.**

Persentase RealisasiPenerimaan PBB di KecamatanBansari

Tahun 2020 – 2020 Triwulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari | 272.383.348 | 244.413.153 | 244.686.648 | 244.352.721 | 244.843.165 | 233.511.724 |
| 2 | Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari | 272.383.348 | 244.413.153 | 244.686.648 | 244.352.721 | 244.843.165 | 233.511.724 |
| 3 | Persentase (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan I*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari sampai bulan Desember 2020 mencapai 100%. Penurunan jumlah ketetapan PBB tahun 2020 jika dibandingkan dengan ketetapan PBB tahun 2019 dikarenakan usulan perbaikan/revisi jumlah ketetapan pajak. Data dukung realisasi penerimaan semua desa tahun 2020 seperti Tabel berikut:

**Tabel 5.2.**

Realisai Penerimaan PBB di semua Desa

di Kecamatan Bansari tahun 2020 s.d. Triwulan I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Ketetapan PBB | TANGGAL LUNAS |
| 1 | BANSARI | 39.537.186 | 16 Oktober 2020 |
| 2 | MRANGGEN TENGAH | 23.580.756 | 29 September 2020 |
| 3 | MRANGGEN KIDUL | 22.009.968 | 16 Oktober 2020 |
| 4 | BALESARI | 17.827.510 | 30 September 2020 |
| 5 | TLOGOWERO | 11.217.406 | 17 September 2020 |
| 6 | CAMPURANOM | 11.503.685 | 25 September 2020 |
| 7 | TANUREJO | 7.299.871 | 30 September 2020 |
| 8 | CANDISARI | 25.508.380 | 30 September 2020 |
| 9 | MOJOSARI | 21.636.614 | 16 September 2020 |
| 10 | GENTINGSARI | 7.233.470 | 21 September 2020 |
| 11 | GUNUNGSARI | 11.080.466 | 21 September 2020 |
| 12 | PURBOREJO | 27.534.307 | 5 Oktober 2020 |
| 13 | REJOSARI | 7.542.105 | 30 September 2020 |
| JUMLAH | | 233.511.724 |  |

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan I*

Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat mengakibatkan pelunasan PBB sampai dengan Triwulan IV baru terlunasi seluruhnya (100%).

1. **Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang tertib dalam pengelolaan aset adalah sebagai berikut: jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Bansari Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 6.1.

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% |

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa semua desa di Kecamatan Bansari telah mencatat semua asetnya dalam buku Inventaris Barang.

1. **Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 7.1

Desa yang menyerahkan LPPD Tepat Waktu

di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 2 | Jumlah desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase | 77 % | 77 % | 92% | 92 % | 100 % | 100 % |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2020*

Tabel 7.2

Daftar Pengesahan LPPD

Di Kecamatan Bansari Tahun 2020 Triwulan I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Tanggal Pengesahan | Keterangan |
| 1 | Gunungsari | 21-01-2020 | Tepat Waktu |
| 2 | Bansari | 03-01-2020 | Tepat Waktu |
| 3 | Mojosari | 20-01-2020 | Tepat Waktu |
| 4 | Rejosari | 31-12-2019 | Tepat Waktu |
| 5 | Balesari | 17-02-2020 | Tepat Waktu |
| 6 | Purborejo | 10-01-2020 | Tepat Waktu |
| 7 | Tlogowero | 07-02-2020 | Tepat Waktu |
| 8 | Mranggen Kidul | 06-01-2020 | Tepat Waktu |
| 9 | Mranggen Tengah | 31-12-2019 | Tepat Waktu |
| 10 | Candisari | 31-01-2020 | Tepat Waktu |
| 11 | Campuranom | 17-03-2020 | Tepat Waktu |
| 12 | Gentingsari | 21-01-2020 | Tepat Waktu |
| 13 | Tanurejo | 15-01-2020 | Tepat Waktu |

*Sumber : Kecamatan Bansari, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari sampai Tri Wulan I adalah 100 %

1. **Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan Tepat Waktu**.

Definisi desa menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

**Tabel 8.1.**

Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | n.a | n.a | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu (%) | 0 | 0 | 92 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan I.*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari sudah menyelesaiakan kegiatan tepat waktu karena berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian akan dilihat di akhir Tahun.

1. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 9.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 |
| 3 | Persentase | 77 % | 77 % | 77 % | 85 % | 100 % | 15,38 % |

*Sumber:Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan I*

Tabel 8.2

Daftar Perdes RKP-Des Kecamatan Bansari Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | PERDES RKPDes | | Keterangan |
| Nomor | Tanggal |
| 1 | Bansari | 5 Tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | Terlambat |
| 2 | Mojosari | 6 Tahun 2020 | 12 November 2020 | Terlambat |
| 3 | Rejosari | 8 Tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | Terlambat |
| 4 | Gunungsari | 8 Tahun 2020 | 8 Oktober 2020 | Terlambat |
| 5 | Balesari | 10 Tahun 2020 | 28 Oktober 2020 | Terlambat |
| 6 | Purborejo | 6 Tahun 2020 | 15 Oktober 2020 | Terlambat |
| 7 | Tlogowero | 4 Tahun 2020 | 26 Oktober 2020 | Terlambat |
| 8 | Mranggen Kidul | 9 Tahun 2020 | 27 Oktober 2020 | Terlambat |
| 9 | Mranggen Tengah | 8 Tahun 2020 | 22 Oktober 2020 | Terlambat |
| 10 | Candisari | 8 Tahun 2020 | 31 Oktober 2020 | Terlambat |
| 11 | Campuranom | 7 Tahun 2020 | 27 Oktober 2020 | Terlambat |
| 12 | Gentingsari | 7 Tahun 2020 | 3 September 2020 | Tepat Waktu |
| 13 | Tanurejo | 7 Tahun 2020 | 27 Oktober 2020 | Terlambat |

*Sumber : Dinpermades 2020*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bansari yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu (ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September) sebanyak 1 desa (7,69%). Keterlambatan ini disebabkan adanya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung nomor : B/001061/014/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal penyusunan RKP-Desa Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penetapan Perdes RKP-Desa Tahun 2021 paling lambat bulan Oktober Tahun 2020.

1. **Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu**

# Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh penerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 10.1.**

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan BansariTahun 2015 – 2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yangmenyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase | 85% | 85% | 85% | 90% | 100% | 100% |

*Sumber: Kecamatan Tahun 2020 s.d Triwulan I*

**Tabel 10.2**

Daftar Perdes APB-Des Kecamatan Bansari Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | PERDES APBDes | | Keterangan |
| Nomor | Tanggal |
| 1 | Bansari | 10 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 2 | Mojosari | 12 Tahun 2020 | 31 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 3 | Rejosari | 9 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 4 | Gunungsari | 9 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 5 | Balesari | 11 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 6 | Purborejo | 7 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 7 | Tlogowero | 7 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 8 | Mranggen Kidul | 11 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 9 | Mranggen Tengah | 10 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 10 | Candisari | 10 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 11 | Campuranom | 9 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 12 | Gentingsari | 9 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |
| 13 | Tanurejo | 9 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | Tepat Waktu |

*Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2020 sd Triwulan I.*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari menyelesaikan APB-Des tepat waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2019.

1. **Persentase rumah tidak layak huni**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 11.1.**

Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Kecamatan Bansari Tahun 2015-2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah rumah tidak layak huni | 1261 | 1221 | 1.089 | 906 | 906 | 566 |
|  | Jumlah yang ditangani | 231 | 344 | 546 | 670 | 670 | 409 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 5.954 | 5.954 | 7.839 | 7.839 | 7.839 | 7,921 |
| 3 | Persentase | 21,18 | 20,50 | 13,89 | 11,55 | 11,55 | 6,39 |

*Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2019*

**Tabel 11.2**

Jumlah Perhitungan Perumahan RTLH

Kecamatan Bansari Triwulan I Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | JUMLAH AWAL | TERBANGUN | BELUM TERBANGUN | Tidak layak Mendapat Bantuan |
| 1 | Tlogowero | 35 | 25 | 10 | - |
| 2 | Balesari | 83 | 60 | 23 | - |
| 3 | Mranggen Kidul | 6 | 4 | 2 | - |
| 4 | Mranggen Tengah | 16 | 12 | 4 | - |
| 5 | Bansari | 119 | 86 | 33 | - |
| 6 | Candisari | 10 | 7 | 3 | - |
| 7 | Gunungsari | 30 | 22 | 8 | - |
| 8 | Rejosari | 42 | 30 | 12 | - |
| 9 | Purborejo | 24 | 17 | 7 | - |
| 10 | Gentingsari | 20 | 14 | 6 | - |
| 11 | Mojosari | 106 | 78 | 28 | - |
| 12 | Tanurejo | 17 | 12 | 5 | - |
| 13 | Campuranom | 58 | 42 | 16 | - |

Dilihat dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa masih ada rumah yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

1. **Persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik**

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

* Masih layak untuk digunakan
* 83% kondisi bangunan secara umum baik
* Ada toilet
* Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baikadalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

# Tabel 12.1.

# Persentase Tempat ibadah kondisi baik Tri Wulan I

# Kecamatan Bansari Tahun 2015-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Jumlah tempat ibadah kondisi baik | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | - Islam | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | - Kristen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Katholik | - | - | - | - | - | - |
|  | - Hindu | - | - | - | - | - | - |
|  | - Budha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Konghuchu | - | - | - | - | - | - |
|  | Jumlah tempat ibadah | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | % tempat ibadah kondisi baik | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

*Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2020 s.d Triwulan I*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik selama 6 Tahun sebesar 83 %.

1. **Persentase Penanganan Laporan Kejadian**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 13.1.**

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari

Tahun 2015 – 2020 sampai Tri Wulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Jumlah laporan kejadian | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 dapat tertangani 100%.

**Tabel 13.2**

Laporan Kejadian

Di Kecamatan Bansari Tahun 2020 Triwulan I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tlogowero | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Balesari | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Mranggen Kidul | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Mranggen Tengah |  | - | 2 | - | 1 | - |
| 5 | Bansari | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 | Candisari | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | Gunungsari | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Rejosari | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Purborejo | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | Gentingsari | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Mojosari | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Tanurejo | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Campuranom | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber : Kecamatan Bansari, Tahun 2020 s.d Triwulan I*

1. **Angka Kriminalitas Kecamatan**

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang.Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bansari dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 14.1.**

# Angka Kriminalitas Kecamatan Bansari Tahun 2015–2020

| No | Jenis Kriminal | Tahun | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah kasus Narkoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jumlah Kejahatan Seksual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan uang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9. | Jumlah Penduduk | 22.810 | 22.810 | 23.294 | 23.433 | 24.277 | 24.439 |
| 10 | Angka Kriminalitas | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,4 |

*Sumber: Polsek Bansari Tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Bansari dari tahun 2015 sampai tahun 2020 hasilnya fluktuatif sedangkan pada Tahun 2020 Triwulan IV terdapat 1 kasus kriminalitas.

1. **Persentase desa/kelurahan tangguh bencana**

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan dan menghadapi potensi ancaman bencana,adapun tujuan pengembangan desa tangguh bencana adalah agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan bencana yang menimpa wilayahnya.

Untuk memperoleh prosentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

**Tabel 15.1**

Cakupan Desa Tangguh Bencana Tahun 2015 – 2020

sampai Tri Wulan I

| No | Kriteria | Tahun | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan rawan bencana | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

*Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa di Kecamatan Bansari yang berjumlah 13 Desa baru satu Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Mranggen Kidul Kecamatan Bansari.

* 1. **Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

1. **Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
12. **Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. **Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
   1. **Sistem at ika Pen yajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# 

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KECAMATAN BANSARI Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggun Tahun 2018-2023 adalah

“**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG** **TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tentrem** | : | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. |
| **Marem** | : | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata |
| **Gandem** | : | Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global. |

1. **MISI**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama** :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga,**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good* *governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahsebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance.* Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas *(service excellence)*, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM | | |
| --- | --- | --- |
| MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas | | |
| TUJUAN | Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas | |
| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM |
|  | Meningkatkan Manajemen SDM |
| Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa | Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan |
| Peningkatan Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan | Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan |
|  | Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan |
| Peningkatan integrasi system e*-planning* dan *e-budgeting* | Mengoptimalkan integrasi dan fungsi system *e-planning* dan *e-budgeting, e-monev* dan *e-report* |
| Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan | Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia | Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM |
| Meningkatkan manajemen SDM |
| Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan | Meningkatkan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian |
| Meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian |
| Menerapkan SPM di perangkat daerah |

*Sumber : Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023*

1. **TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KECAMATAN BANSARI**

Terselenggaranya *Good Governance*, Kepemerintahan yang baik harus dapat dicapai dan sebagai prasarat utama bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pemerintah Kecamatan Bansari dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut diperlukan adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai acuan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Temanggung.

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dan sasaran Kecamatan Bansari adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Menciptakan pelajar berprestasi ;
2. Meningkatkan perilaku hidup sehat ;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengurus PKK;
7. Meningkatkan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam;
8. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa;
9. Meningkatkan kualitas kehidupan politik , wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban;
10. Meningkakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
11. Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
13. Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
14. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
15. Terwujutnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajement Pemerintah Desa;
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah;
5. Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan antara lain dengan melihat capaian Renstra periode sebelumnya, potensi yang dimiliki Kecamatan Bansari, dan dengan mengingat kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Bansari.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Bansari untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pelajar berprestasi;
2. Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
4. Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
5. Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat.
7. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
8. Peningkatan Lingkungan Sehat;
9. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
10. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan

pengkajian pembangunan daerah;

1. Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah
2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Peningkatan tertib admiministrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur.

Berdasarkan strategi diatas maka arah kebijakan pembangunan Kecamatan Bansari tahun 2020 adalah :

* + - * 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

Program dan kegiatan Kecamatan adalah :

1. Pencapaian visi dan misi daerah;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   * + - 1. Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
     1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan dengan Kegiatan:
   * Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan;
   * Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan;
   * Fasilitasi Pembinaan dan pengisian Kepala Desa,Peangkat Desa dan BPD.
     1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan dengan kegiatan :
   * Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
   * Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa
   * Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
     1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan Kegiatan:
   * Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
   * Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
   * Pendampingan Program barang bersubidi.
     1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diKecamatan:
   * Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum;
   * Pemantauan Pilkada,Pilpres, dan Pemilu Legeslatif di Tingkat Kecamatan.
   * Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).
     1. Program Perencanaan Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat daerah;
     2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
   * Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
   * Penyediaan jasa kebersihan kantor
   * Penyediaan alat tulis kantor
   * Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   * Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan
   * Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
   * Penyediaan makanan dan minuman
   * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
   * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
   * Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
     1. PragramPeningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
   * Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   * Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   * Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
   * Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas dan Operasioanal
   * Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/dinas
   * Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
   * Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor
   1. **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN |
| --- | --- | --- |
|
| Terwujudnya pemerintahan good governance | | Tingkat Konsistensi Program Pembangunan |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa | Persentase pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan |
|  | Persentase realisasi Penerimaan PBB |
| Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu |
|  | Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Angka kriminalitas kecamatan |
|  | Persentase penanganan laporan kejadian |
| Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah | Persentase tempat ibadah kondisi baik |
| Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS | Persentase RTLH |

* 1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome) yang seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Bansari Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Camat Bansari Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 4 program 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar ***Rp 161.925.400,-*** ( Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah ).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Bansari Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan | 100 | % |
| 2 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa | Persentase pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan | 1 | % |
| Persentase realisasi Penerimaan PBB | 100 | % |
| Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 100 | % |
| Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 100 | % |
| 3 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Angka kriminalitas kecamatan | 4,3 | % |
| Persentase penanganan laporan kejadian | 100 | % |
| 4 | Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah | Persentase tempat ibadah kondisi baik | 75 | % |
| 5 | Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS | Persentase RTLH | 10,57 | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan | 67.510.000 | APBD |
| 2 | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 55.258.000 | APBD |
| 3 | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 16.190.000 | APBD |
| 4 | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan | 22.967.400 | APBD |

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023. Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **TARGET 2020** | **RUMUS** | **SUMBER DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Persentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan | 100% | jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah | Kec. Bansari |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa. | Pesentase Pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan | 100% | jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100% | Kec. Bansari |
|  |
|  |  | Persentase Realisasi Penerimaan PBB | 100% | jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100% | Kec. Bansari |
|  |  | Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 100% | jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% | Kec. Bansari |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu | 100% | jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% | Kec.  Bansari |
|  | Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah. | Persentase tempat ibadah kondisi baik | 100% | jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah | Kec. Bansari |
|  | Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS | Presentase RTLH | 100% | jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. | Kec. Bansari |
|  | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan tertib hukum | 100% | jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 | Kec. Bansari |

* 1. **Rencana Anggaran Tahun 2020**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 10.119.754.993,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.840.109.893,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.279.645.100,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

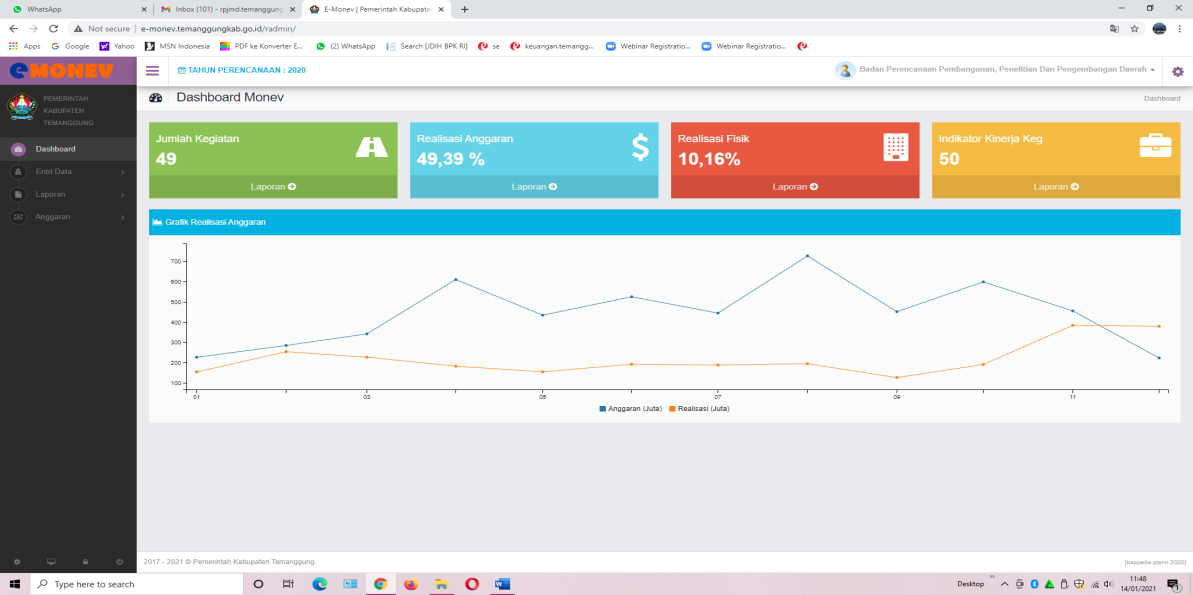
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sasaran | Renstra | Renja | APBD |
| Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan | 34.200.000 | 34.200.000 | 14.219.000 |
| Koordinasi Potensi Desa | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.050.000 |
| Koordinasi Pemberdayaaan Masyarakat Desa/Kelurahan | 38.300.000 | 38.300.000 | 23.072.000 |
| Fasilitasi Kawasan Perdesaan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 19.400.000 | 19.400.000 | 4.827.000 |
| Koordinasi Penanggulangan kemiskinan | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 |
| Fasilitasi Pengembangan Kawasan Wira Usaha | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 16.800.000 | 16.800.000 | 4.299.500 |
| Forum koordinasi Pemimpin keamatan (FORKOPINCA) | 13.200.000 | 13.200.000 | 26.200.000 |
| Penyusun dan Pelaporan Dokumen Perencanaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.417.000 |
| JUMLAH | **204.100.000** | **204.100.000** | **105.084.500** |

* 1. **Instrumen Pendukung Kinerja**

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **E-MONEV**

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.

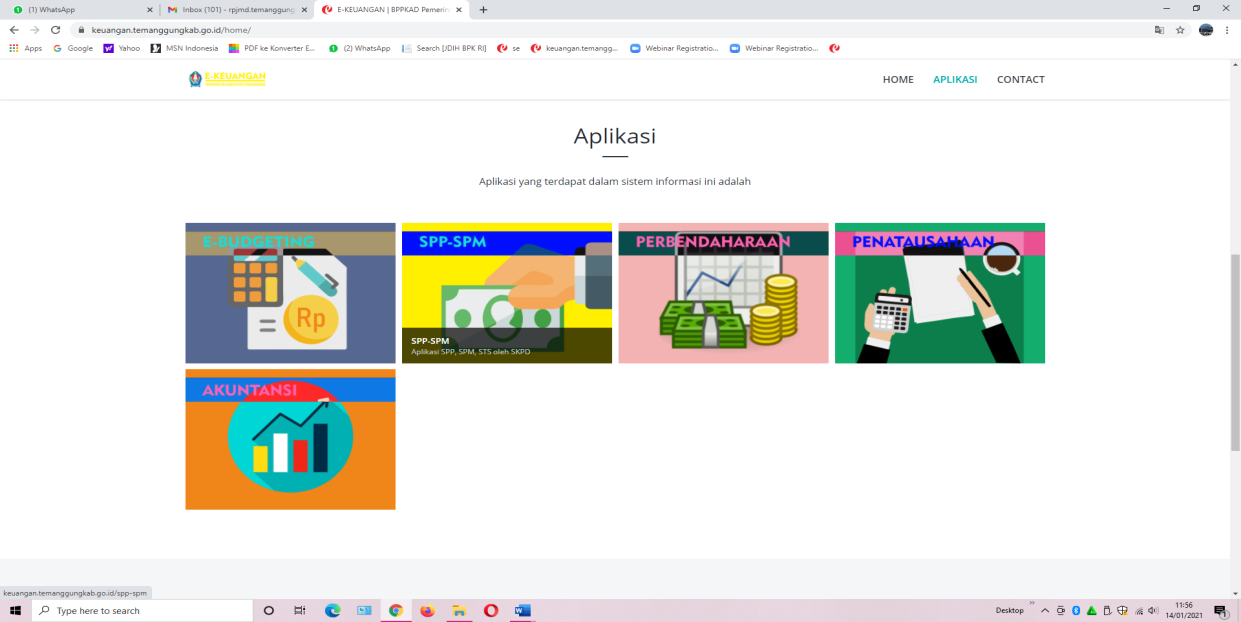


Gambar 5.1

*Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah*

1. **E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik**

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



*Gambar 5.2*

*Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*

1. **SIPD** : **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efesien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

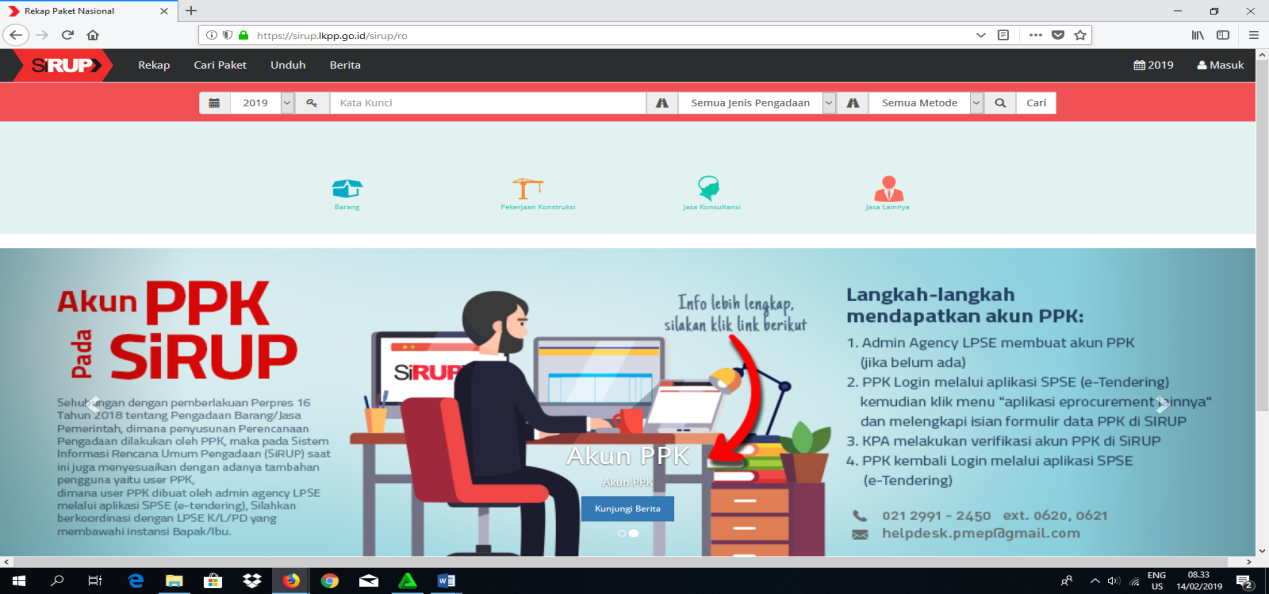


Gambar 5.3

*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*

1. **SiRUP :** Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

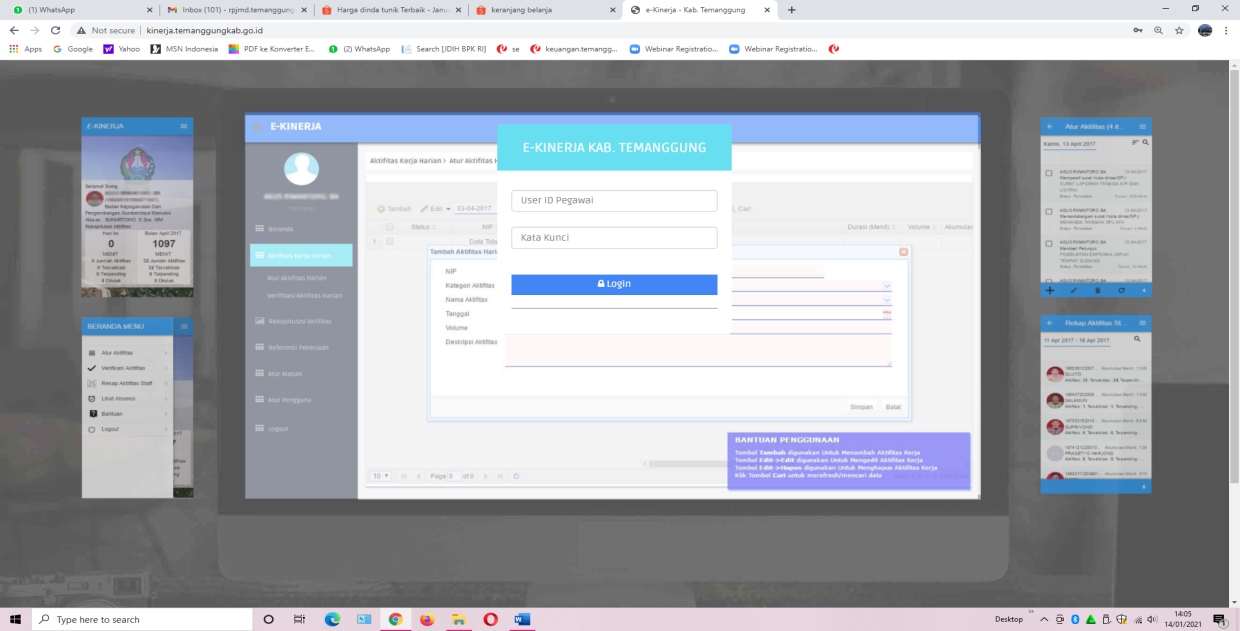


*Gambar 5.4*

*Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan*

1. **E - KINERJA**

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertangungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



*Gambar 5.5*

*Sistem Informasi Kinerja ASN*

1. **SIMPEG**

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



*Gambar 5.6*

*Sistem Informasi Kepegawaian*

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

* 1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SKALA CAPAIAN KINERJA** | **KATEGORI** |
| 1 | 100% | Memuaskan |
| 2 | 85,00 % < capaian < 99,99% | Sangat Baik |
| 3 | 70,00 % < capaian < 85,00 % | Baik |
| 4 | 56,00 % < capaian < 70,00 % | Cukup |
| 5 | Capaian< 55,00 % | Kurang |

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

* + - * 1. **Capaian Kinerja Utama Kecamatan Bansari**
  1. **Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Bansari**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bansari. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Kecamatan Bansari Tahun 2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan (IKU) | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%) |
| **Target (%)** | **Realiasasi (%)** | **Capaian (%)** | **Target (%)** | **Realiasasi (%)** | **Capaian (%)** |
| Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | 100 | 97,83 | 97,83 | 100 | 97,83 | 97,83 | 97,83 |
| Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | 1 | 0 | 100 | 1 |  |  |  |
| Persentase realisasi penerimaan PBB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Angka kriminalitas kecamatan | 100 | 4,3 | 0 | 100 |  |  |  |
| Persentase penanganan laporan kejadian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase tempat ibadah kondisi baik | 100 | 75 | 84 | 100 | 75 | 84 | 84 |
| Persentase RTLH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari tebel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

**Misi 3 (Ketiga):** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:

1. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan mencapai 97,83 %
2. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, mencapai 100%
3. Persentase realisasi penerimaan PBB, mencapai 100 %.
4. Persentase jumlah desa yag menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, mencapai 100%
5. Pesrsentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, mencapai 100%.
6. Angka Kriminalitas Kecamatan, mencapai 100%
7. Persentase penanganan laporan kejadian, mencapai 100%
8. Persentase tempat ibadah kondisi baik, mencapai 100%
9. Persentase RTLH, mencapai 90,74%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Bansari Kabuapeten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 98.73 %

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Kecamatan Bansari yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Konsistensi Program Pembangunan, guna menunjang pencapaian Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Kecamatan Bansari Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.2

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Kecamatan Bansari Tahun 2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan (IKU) | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%) |
| **Target (%)** | **Realiasasi (%)** | **Capaian (%)** | **Target (%)** | **Realiasasi (%)** | **Capaian (%)** |
| Tingkat Konsistensi Program Pembangunan | 100 | 96,80 | 96,80 | 100 | 99,20 | 99,20 | 99,20 |

Capaian indikator tujuan Kecamatan Bansari tahun 2020 sebesar 99,2% dari target 100%, dari 125 program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2020 sebanyak 124 program. Terdapat 1 program dalam RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD yaitu Program Pengembangan Kawasan Strategis, sedangkan program pada RKPD diluar RPJMD yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemrintahan desa. Capaian pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2019 (96,80%), dikarenakan terdapat 4 program dalam RKPD yang tidak selaras dengan RPJMD yaitu :

* + Program Pengembangan Kawasan Strategis;
  + Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
  + Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa;
  + Program pemberdayaan transmigran.

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain:

1. Belum diguanakannya input RPJMD dalam *e-planning* sebagai lampiran RPJMD;
2. Adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur dan proses perencanaan dan penyusunan laporan;
3. Aplikasi yang dibangun belum bisa digunakan secara maksimal, masih banyak lembar kerja yang belum berfungsi secara benar, sehingga pada tahap awal penggunaan aplikasi malah memperlama proses laporan, adanya pergantian personil, sehingga SDM perencana yg baru belum sepenuhnya memahami alur perencanaan dan proses entry e-planning
4. Keterbatasan anggaran serta timbulnya kebijakan nasional yang harus ditindaklanjuti dengan kegiatan baru di luar Renstra;
5. Belum dimanfaatkannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan secara maksimal;
6. Masih rendahnya iklim inovasi di Kabupaten Temanggung.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu mengoptimalkan pemanfaatan hasil input RPJMD pada *e-planning* sehingga secara otomatis terintegrasi dengan RKPD. Tahun 2020 dengan berlakunya Permendagri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka diharapkan konsistensi perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan K/L/D/I di Indonesia dapat selaras.

* 1. **Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bansari**

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 4 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2

Predikat Kinerja Sasaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumlah Indikator |
| 1 | Memuaskan | - | - |
| 2 | Sangat baik | - | - |
| 3 | Baik | 5 | 9 |
| 4 | Cukup | - | - |
| 5 | Kurang | - | - |
| **Jumlah** | | **5** | **9** |

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpukan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Memuaskan”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.3

Pencapaian Sasaran Kecamatan Bansari

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1 | 100 | Memuaskan |
| 2 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa. | 4 | 100 | Memuaskan |
| 3 | Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah. | 1 | 100 | Memuaskan |
| 4 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | 2 | 100 | Memuaskan |
| Jumlah | | 8 |  |  |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 8 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”.** Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori ***“Memuaskan*”** yaitu berada pada rentang Capaian 100% berada pada angka 100. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 100%.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

**2). Sasaran Strategis 1:**

***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **”Memuaskan”.** Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

| No | Indikator sasaran | Satuan | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | Realiasasi | Capaian | Target | Realiasasi ( | Capaian |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | 100 | 97,83 | 97,83 | 100 | 97,83 | 97,83 | 100 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | |  |  | **100** |  |  | **100** | **100** |

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dicapai sesuai dengan target namun hal-hal yang perlu dilakukan antisipasi terhadap fakto-faktor yang dapat menghambat, antara lain :

* adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur, proses pelayaan dan penyusunan laporan;

**2 ) Sasaran Strategis 2**

***Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa***.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **”Memuaskan”.** Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa

| No | Indikator sasaran | Satuan | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | Realiasasi | Capaian | Target | Realiasasi ( | Capaian |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase realisasi penerimaan PBB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | |  |  | **100** |  |  | **100** | **100** |

Secara umum semua indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan.

3 ) Sasaran Strategis 3

***Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **”Memuaskan”.** Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3

Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah

| No | Indikator sasaran | Satuan | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | Realiasasi | Capaian | Target | Realiasasi ( | Capaian |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Persentase RTLH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | |  |  | **100** |  |  | **100** | **100** |

Secara umum, indikator pada sasaran strategis Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan. Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung merupakan kepanjangan tangan pelaksnaan kebijakan Kabupaten yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kabupaten diwilayah kecamatan, sehingga Kecamatan Bansari harus memastikan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.

1. **Sasaran Strategis 4**

***Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **”Memuaskan”.** Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.4

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

| No | Indikator sasaran | Satuan | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | Realiasasi | Capaian | Target | Realiasasi ( | Capaian |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Persentase Angka kriminalitas kecamatan | 100 | 4,3 | 0 | 100 | 4,3 | 0,02 | 100 |  |
| 2 | Persentase penanganan laporan kejadian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | |  |  | **100** |  |  | **100** | **100** |

Secara umum semua indikator pada sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan. Terlepas dari adamya angka kriminalitas, secara umum bisa disampaikan bahwa tingkat ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bansari dapat dikatakan cukup baik.

* 1. **Akuntabilitas Keuangan**

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Bansari Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.249.758.288,- terealisasi sebesar 77,04% atau sebesar Rp. 1.733.321.665,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

* Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.139.713.964,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.549.422.854,- atau sebesar 72,41% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

* Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 5 program dan 8 kegiatan, dari 8 kegiatan tersebut berkurang menjadi 6 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 240.922.500,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 231.085.735,- atau sebesar 95,92% dari total anggaran Belanja Langsung. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Kinerja Anggaran per Program dan Kegiatan

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

Tahun 2020

| **NO** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1** | **Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan** | **43.269.000** | **43.269.000** | 100 |
| a | Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan | 14.219.000 | 14.219.000 | 100 |
| b | Koordinasi Potensi Desa | 29.050.000 | 29.050.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan** | **23.072.000** | **23.072.000** | 100 |
| a | Koordinasi Pemberdayaaan Masyarakat Desa/Kelurahan | 23.072.000 | 23.072.000 | 100 |
| b | Fasilitasi Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| c | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan** | **4.827.000** | **4.827.000** | 100 |
| a | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 4.827.000 | 4.827.000 | 100 |
| b | Koordinasi Penanggulangan kemiskinan | 0 | 0 | 0 |
| c | Fasilitasi Pengembangan Kawasan WiraUsaha | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan** | **30.499.500** | **26.099.500** | 86 |
| a | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 4.299.500 | 4.299.500 | 100 |
| b | Forum koordinasi Pemimpin keamatan (FORKOPINCA) | 26.200.000 | 26.200.000 | 100 |
| **JUMLAH** | | **101.667.500** | **97.267.500** | **95,67** |

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| **NO** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1** | **Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah** | **3.417.000** | **3.242.000** | **95** |
| a | Penyusun dan Pelaporan Dokumen Perencanaan | 3.417.000 | 3.242.000 | 95 |
| **2** | **Program pelayanan adminsitrasi perkantoran** | **113.158.000** | **104.078.085** | **91,98** |
| a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 19.998.000 | 16.837.464 | 84,20 |
| b | Penyediaan alat tulis kantor | 3.500.000 | 3.500.000 | 100 |
| c | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4.590.000 | 4.590.000 | 100 |
| d | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.670.000 | 2.670.000 | 100 |
| e | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| f | Penyediaan makanan dan minuman | 14.400.000 | 13.115.000 | 91,08 |
| g | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 700.000 | 700.000 | 100 |
| h | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 9.160.000 | 9.160.000 | 100 |
| i | Penyediaan Jasa pengamanan Gedung/Kantor | 40.320.000 | 36.022.072 | 89,34 |
| j | Jasa pelayanan perkantoran | 17.820.000 | 17.483.549 | 98,11 |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Program peningkatan sarana prasarana aparatur** | **22.680.000** | **21.578.150** | **95,14** |
| a | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 |
| b | Pengadaan peralatan gedung kantor | 0 | 0 | 0 |
| c | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 3.000.000 | 2.550.000 | 85 |
| d | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 15.680.000 | 15.028.150 | 95,84 |
| e | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Dinas Camat | 0 | 0 | 0 |
| f | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **4** | Pengadaan Pakaian Dinas besera perlengkapannya | 4.920.000 | 4.920.000 | **100** |
| a | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 9.980.000 | 9.980.000 | 100 |
| **JUMLAH** | | 139.255.000 | 133.818.235 | 96,10 |

Pelaksanaan penganggaran pada beberapa program dan kegiatan mengalami penurunan. Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran dikarenakan beberapa program/kegiatan tidak dilaksanakan terkait kewaspadaan akibat terjadinya pandemi covid -19.

1. **Analisa Efisiensi**

Capaian realisasi angaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **% Realisasi**  **Anggaran** | **% Capaian**  **Kinerja** | **Efisiensi** |
| 1 | Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan | 86,00% | 100% | 14,00 |
|  | **Rata-Rata** | **96,50%** | **100%** | **3,50** |

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 96,50% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 3,50. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai akibat dari pengurangan anggaran sebagai akibat adanya pendemi covid-19.

* 1. **PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Prestasi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 yaitu diraihnya prestasi sebagai Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Temanggung atas nama Desa Tanurejo Kecamatan Bansari.

Adapun prestasi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 yaitu merah Juara I Lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.25.17 (1).jpeg** | **D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.25.18.jpeg** |
| *Gambar*  *Pelaksana Terbaik I*  *Lomba Gotong Royong Masyarakat*  *Tingkat Provinsi Jawa Tengah*  *Kategori Desa* | |

|  |  |
| --- | --- |
| D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.31.13.jpeg | D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.25.17.jpeg |
| *Gambar Kegiatan*  *Lomba Gotong Royong Masyarakat*  *Tingkat Provinsi Jawa Tengah*  *Kategori Desa* | |
| D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.31.14.jpeg | D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.31.17.jpeg |
|  | |
| D:\HARI 2020\LKjIP\WhatsApp Image 2021-02-16 at 08.31.15.jpeg | |

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

1. **Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bansari**

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***”Memuaskan”*** yaitu dengan nilai **100**%,

1. **Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kuaitas sumber daya manusia sebagai aparatur pelayanan di Kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna memperkuat komitmen dan perhatian dari sektor lain dan Pemerintah Kabupaaten Temanggung sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat efektif dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan kesadaran bersama atas peran dan fungsi Kecamatan agar tujuan Kecamatan bagi masyarakat dapat betul-betul tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |